

**Judul** : DPR pertanyakan isu keretakan panglima TNI dengan KSAD  
**Tanggal** : Selasa, 06 September 2022  
**Surat Kabar** : Kompas  
**Halaman** : 2

## PERTAHANAN

### DPR Pertanyakan Isu Keretakan Panglima TNI dengan KSAD

**JAKARTA, KOMPAS** — DPR mempertanyakan isu keretakan antara Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dan Kepala Staf TNI AD Jenderal Dudung Abdurachman. Ketidakharmonisan itu ditengarai menjadi salah satu penyebab masalah pembinaan anggota TNI sehingga muncul kasus-kasus kriminalitas yang melibatkan prajurit.

Pertanyaan salah satunya dilontarkan anggota DPR, Effendi Simbolon, dalam rapat kerja Komisi I dengan Menteri Pertahanan, Panglima TNI, dan tiga kepala staf TNI, Senin (5/9/2022). "Ingin penjelasan, ketidakpatuhan sampai urusan anak KSAD gagal masuk Akmil (Akademi Militer) pun menjadi isu. Memangnyanya kalau anak KSAD kenapa? Memang harus masuk?" tutur-nya.

Awalnya rapat mempermasalahkan ketidakhadiran Menhan Prabowo Subianto dan KSAD Jenderal Dudung Abdurachman. Kehadiran Menhan disebutkan penting dalam pembahasan anggaran. Kehadiran KSAD juga penting terutama untuk mengonfirmasi berbagai isu aktual di Papua.

Wakil Menteri Pertahanan M Herindra menjelaskan, Prabowo absen karena menemani Presiden Joko Widodo bertemu Presiden Filipina. Sementara itu, Wakil KSAD Letjen Agus Subiyanto menyampaikan, Dudung berada di Lampung untuk memberi pengarahan kepada Yonif yang akan bertugas di Papua. Ke-



Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa (kanan), Kepala Staf TNI AL Laksamana Yudo Margono (tengah), dan Kepala Staf TNI AU Marsekal TNI Fadjar Prasetyo menghadiri rapat kerja dengan Komisi I DPR di Gedung Parlemen, Jakarta, Senin (5/9/2022). Rapat tidak dihadiri Kepala Staf TNI AD Jenderal Dudung Abdurachman.

hadiran KSAD akan menjadi penyemangat prajurit mengingat belakangan ini banyak kasus yang terjadi.

Rapat lalu membahas berbagai aspek tentang anggaran. Saat giliran Effendi bicara, ia kembali mempertanyakan masalah keretakan yang telah lama menjadi rahasia umum. "Di mana ada Andika, di situ tidak ada Dudung, seperti waktu Garuda Shield kemarin," ucapnya.

Andika langsung membantah isu keretakan tersebut. Ia menegaskan bahwa hubungannya dengan Dudung baik-baik saja. Selama ini, semua diberlakukan sesuai peraturan.

Anak Dudung juga kini telah memulai pendidikan di Akmil.

Saat dikonfirmasi lewat pesan singkat, Dudung juga membantah adanya disharmonisasi. "Hubungan baik-baik saja," katanya.

#### Hindari politisasi

Menanggapi sikap DPR, Iis Gindarsah dari Lab 45 mengatakan, prinsip kendali demokratik sipil atas militer meniscayakan proporsionalitas. Pengawasan legislatif menurut parameter fungsional, bukan personal. Tujuannya adalah untuk menghindari politisasi tentara.

Karena itu, politisi sipil dilarang mencampuri urusan-urusan yang berada dalam ranah profesi kemiliteran, apalagi soal kualitas kepemimpinan. Setiap organisasi, terutama TNI, pasti punya mekanisme khusus dan unik untuk menyelesaikan masalah-masalah internal mereka.

Dalam kondisi sulit sekalipun, menurut Iis, pengawasan DPR di bidang pertahanan tetap harus menjaga marwah pimpinan TNI dan memperhatikan prerogatif presiden sebagai pemimpin tertinggi militer. Tanpa itu, integritas rantai komando akan runtuh.

(EDN)